

MEMBANGUN (KEMBALI) SISTEM DEMOKRASI

(Telaah Konstitusi dan Relevansinya Menekan Potensi Radikalisme)

Oleh Herry 'Ugie' Sugiharto
Bandung, 13 Juni 2017

Topik telaah sistem demokrasi dan wacana radikalisme saat ini menjadi kebutuhan penting kita. Mengapa? Karena keduanya memberi andil secara langsung dalam kehidupan berbangsa. Apakah keduanya bertautan dan punya benang merah? Apakah yang satu berimplikasi pada lainnya? Ataukah masing-masing berdiri sendiri?

Sistem demokrasi yang cenderung chaotik, memberi celah bagi tumbuhnya radikalisme. Kelemahan sistem demokrasi -- yang mengatur hak politik warga negara -- ini, akan menguatkan bibit-bibit radikalisme sektarian, karena bagaimana pun radikalisme adalah upaya untuk “mengambil hak kuasa” atas sistem sosial-ekonomi-politik yang saat ini dianggap gagal memenuhi harapan hajat hidup masyarakat. Radikalisme bisa ditumbuhkan atas nama apapun, ideologi atau kepercayaan agama-agama. Keduanya memiliki potensi radikalisme dalam dirinya, setidaknya atas penafsiran para penganutnya masing-masing.

Kita pernah mengalami masa ketika konstitusi kita, UUD 1945, yang kelahirannya dilalui dengan diskusi-diskusi dan perdebatan ilmiah dan sikap kenegarawanan yang matang dari founding fathers, dibajak menjadi alat legitimasi otoritarian penguasa, baik Orde Lama atau Orde Baru.

Memang, UUD 1945 bukan lah kitab suci dan “harga mati”. Dia adalah buah karya para pejuang, yang begitu menjiwai dan terlibat dalam karya-karya kebangkitan nasionalisme di era kolonialisme lama. Tapi apapun kelemahannya, konstitusi ini digali, diformulasikan dan dipersembahkan bagi kepentingan bangsa nusantara yang multi etnik (suka – ras) dan multi agama ini. Indah. Hampir susah kita temukan interes pribadi atau kepentingan sektarian yang menonjol. Kalau pun ada, akhirnya kembali pada jalur cita-cita kebangsaan.



Hampir susah kita temukan interes pribadi atau kepentingan sektarian yang menonjol. Kalau pun ada, akhirnya kembali pada jalur cita-cita kebangsaan.



Tengok saja debat Maramis dengan Wahid Hasyim tentang bangsa beragama, atau Soekarno dan Hatta tentang pilar ekonomi dan kesejahteraan, atau Soepomo dan Soekarno tentang demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.

Dalam notulen rapat-rapat di BPUPKI dan PPKI, masing-masing tokoh menggali secara falsafi pokok-pokok pikiran tentang dasar negara, bahkan studi empiris tentang system bernegara di negara-negara berkembang lainnya mereka lakukan secara intelektual untuk menghindari bias-bias aksiomatik. Dan ketika perdebatan selesai dengan dformulasi yang disepakati, saat itu lah konsesus tentang bernegara terwujud. Ini bukan saja legacy untuk bangsa, tapi ini juga koridor-paradigmatik yang digali dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam perjalanan bangsa ini. Bukan titipan agenda kolonial, juga bukan pemaksaan prinsip-prinsip sectarian demi kepentingan kelompok dan golongan. Dan di sini lah bangunan bernama Indonesia mendapatkan ruh/nyawanya.



Ini bukan saja legacy untuk bangsa, tapi ini juga koridor-paradigmatik yang digali dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam perjalanan bangsa ini. **Dan di sini lah bangunan bernama Indonesia mendapatkan ruh/nyawanya.**



Bahwa kemudian kita mengenal aksi-aksi separatis dan radikalisme pada tahap berikutnya, itu bukan karena konstitusi kita yang buruk, tapi karena tindakan kolonial yang tidak mau kehilangan kekuasaannya di Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaan, dengan membelah dan memecah bangsa ini. Toh pada akhirnya aksi-aksi separatis dan radikalisme yang gagal itu memberi

pelajaran penting bagi kita, bagaimana merawat dan menjaga Indonesia yang bhinneka.

Kita juga pernah memasuki masa suram, sandhya-kala, ketika pada masa Orde Baru, konstitusi dan monoloyalitas “asas tunggal”, dijadikan alat legitimasi untuk menciptakan otoritarianisme penguasa. Konstitusi yang punya kelemahan di sana-sini, dieksploitasi dan dijadikan justifikasi untuk membunuh demokrasi. Bagaimana tidak, meski dilakukan pemilu – sebuah prasyarat demokrasi -- selama 5 kali selama Orde Baru, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah demokrasi prosedural dan alat hegemonik yang efektif, demi langgengnya kekuasaan. Demokrasi politik tidak diterjemahkan secara nyata dan diiringi dengan penegakan hukum dan demokrasi ekonomi.

Ironi? Memang. Konstitusi yang sudah dengan sungguh-sungguh dan susah-payah dirumuskan, hanya dipakai untuk melanggengkan kekuasaan, dan bukan untuk mewujudkan dan menegakkan cita-cita konstitusi itu sendiri.

Jatuhnya rezim orde baru dan tahapan reformasi sesungguhnya adalah berkah. Sayangnya, kita seperti sudah kehilangan naluri dan mata-batin untuk memanfaatkan momentum itu untuk kembali membuat konsensus baru tentang kehidupan berbangsa. Psikologi ketakutan kembalinya kekuatan orde baru ditambah euforia kebebasan dan mulai bergentayangan titipan agenda asing untuk menguasai bangsa ini (neo-kolonial), membuat para perumus perubahan (amandemen) konstitusi seperti buru-buru. Tidak ada perdebatan ilmiah dan matang tentang rumusan perubahan UUD. Rumusan empat (4) kali amandemen UUD sangat terkesan sebagai antitesa UUD'45 orisinal semata. Hasilnya? Bisa kita rasakan dan “nikmati” sendiri saat ini.

Konstitusi yang teramandemen, sebagai basis sistem demokrasi politik dan ekonomi kita, punya andil besar menyediakan lahan bagi demonstrasi (unjuk kekuatan) sektarian. Bukannya kemaslahatan rakyat yang terwujud, tapi pertikaian publik yang terjadi. Ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Wajar jika kegaduhan demokrasi politik kita yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kegagalan sistem demokrasi, memberi celah bagi munculnya aksi-aksi radikal.

Sistem demokrasi yang terlalu terburu-buru dirumuskan, dan tidak dibarengi dengan penyiapan prasyarat demokrasi yang kokoh, serta proses penegakan hukum yang kuat dan pembangunan pondasi demokrasi ekonomi yang adil, justru menjadi ajang

penyuburan bibit-bibit radikalisme. Sistem demokrasi yang tidak matang di negara berkembang, mudah sekali dibajak.

Lantas, apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang serba-kadung seperti sekarang ini? Kita nikmati saja, sambil kita tambal kerusakan-kerusakannya di sana-sini? Atau kita upayakan secara sungguh-sungguh (lagi) usaha perbaikan secara fundamental konstitusi kita sebagai dasar system bernegara dan berbangsa ini?

Ini lah pekerjaan rumah kita, yang masih panjang.



Sistem demokrasi yang terlalu terburu-buru dirumuskan, dan tidak dibarengi dengan penyiapan prasyarat demokrasi yang kokoh, serta proses penegakan hukum yang kuat dan pembangunan pondasi demokrasi ekonomi yang adil, justru menjadi ajang penyuburan bibit-bibit radikalisme.

